

PERAN PEMERINTAH DALAM MITIGASI RESIKO ABRASI DI NAGARI PILUBANG KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Winda Oktarina^{1(a)}, Zikri Alhadi^{2(b)}

^{1,2}Departemen Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang

^{a)}windaoktarina13@gmail.com, ^{b)}Zikri.ianunp@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Article History:

Dikirim:

06-06-2024

Diterbitkan Online:

13-08-2024

Kata Kunci:

Peran Pemerintah, Abrasi, Mitigasi Bencana

Keywords:

Government Role, Abrasion, Disaster Mitigation

Corresponding Author:

windaoktarina13@gmail.com

DOI:

<https://doi.org/10.24036/publicness.v3i2.205>

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada, dengan luas wilayah perairan laut lebih dari sekitar 9.984.670 km² dan 17.500 pulau, serta panjang garis pantai sekitar 54.716 km. Wilayah pantai merupakan area yang unik karena terletak di antara dua pengaruh, yaitu daratan dan lautan. Kawasan pantai adalah wilayah dinamis dengan berbagai ekosistem yang saling berhubungan satu sama lain (Raziq, 2020).

Menurut Kepala BNPB Nomor 07 Tahun 2012, abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh gelombang dan arus laut yang merusak, sering juga disebut sebagai erosi pantai. Kerusakan garis pantai akibat abrasi ini terjadi karena terganggunya keseimbangan alam di daerah pantai. Ketidakseimbangan ekosistem pantai bisa terjadi secara alami atau dipengaruhi oleh aktivitas manusia yang merusak, seperti membuang sampah sembarangan ke pantai, yang tidak hanya merusak keindahan pantai

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran pemerintah dalam upaya mitigasi risiko abrasi di Nagari Pilubang, Kabupaten Padang Pariaman. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dan lokasi penelitian terletak di Korong Pasir Baru, Kecamatan Sungai Limau, Nagari Pilubang, Kabupaten Padang Pariaman. Informan dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam mitigasi risiko abrasi di Nagari Pilubang belum terlaksana secara optimal. Berdasarkan teori peran pemerintah menurut Labolo, yang mencakup peran sebagai regulator, katalisator, dan fasilitator, peran ini belum sepenuhnya terealisasi. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala, seperti keterbatasan anggaran untuk mitigasi, kurangnya sarana dan prasarana, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap ancaman bencana.

ABSTRACT

This study aims to examine the role of the government in abrasion risk mitigation efforts in Nagari Pilubang, Padang Pariaman Regency. This research uses a qualitative method with a descriptive approach, and the research location is in Korong Pasir Baru, Sungai Limau District, Nagari Pilubang, Padang Pariaman Regency. Informants were selected using a purposive sampling technique. Data were collected through observation, interviews, and documentation. The results showed that the role of the government in mitigating abrasion risk in Nagari Pilubang had yet to be optimally implemented. Based on Labolo's theory of the role of government, which includes the role of regulator, catalyst, and facilitator, this role has yet to be fully realized. This is due to several obstacles, such as a limited budget for mitigation, a lack of facilities and infrastructure, and low public awareness of disaster threats.

tetapi juga menyebabkan bencana yang berdampak pada manusia sendiri

Abrasi adalah peristiwa yang diatur oleh Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, terutama dalam Pasal 31. Abrasi terjadi karena arus pantai, gelombang laut, dan pergerakan sedimen di sepanjang pantai. Undang-undang ini memberikan dasar hukum untuk pengelolaan dan penanganan dampak abrasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Namun, abrasi di Indonesia terus menjadi masalah dari tahun ke tahun dan belum sepenuhnya dapat diatasi. Abrasi ini telah berkembang menjadi bencana yang parah setiap tahunnya. Permasalahan yang cukup besar terjadi, khususnya dengan tenggelamnya desa-desa dan pergeseran sosial budaya masyarakat pantai yang tidak lagi bergantung pada sektor perikanan tambak. Seluas 382,8 hektar area hilang akibat abrasi, dengan 228,4 hektar area tergenang rob. Pasang tertinggi pada permukaan air mencapai 40 hingga 60 cm di atas permukaan tanah dan berlangsung selama 4-6 jam. Kabupaten Padang Pariaman adalah daerah Pesisir yang rawan bencana yaitu bencana abrasi yang disebabkan oleh cuaca ekstrem yang dapat memperburuk abrasi selain itu gelombang tinggi juga memicu terjadinya abrasi. Kabupaten Padang Pariaman memiliki 17 Kecamatan dan 103 Nagari dan jumlah penduduk tahun 2021 mencapai 433.018 jiwa. Daerah yang terkena abrasi yaitu Kecamatan Sungai Limau, Kecamatan Ulakan Tapakis dan Kecamatan Batang Gasan yang terkena bencana abrasi tetapi yang terparah yaitu di Kecamatan Sungai limau.

Namun demikian, masih banyak ditemukan permasalahan dalam peran pemerintah dalam mitigasi resiko abrasi di Nagari Pilubang Kabupaten Padang Pariaman. Beberapa permasalahan yang di temukan pada peran pemerintah dalam mitigasi resiko abrasi di Nagari Pilubang Kabupaten Padang Pariaman yang sampai saat sekarang ini belum optimal yang dilakukan oleh Pemerintah dalam Mitigasi abrasi yaitu sebagai berikut:

Pertama, belum dilakukan sosialisasi bencana abrasi dengan berkala kepada masyarakat oleh pemerintah daerah yang tujuannya agar masyarakat waspada dalam bencana abrasi, sosialisasi ini sangat penting dilakukan agar masyarakat paham apa yang dilakukan jika terjadi abrasi. Pelaksanaan observasi awal yang dilakukan di Badan

Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Padang Pariaman terkait sosialisasi abrasi kepada masyarakat.

Kedua, belum optimalnya upaya pemerintah dalam mitigasi abrasi yang terjadi di korong Pasir baru. Upaya yang dilakukan pemerintah saat ini hanya berupa bantuan karung untuk mengisi pasir untuk mengatasi pencegahan abrasi yang diletakan di pinggir-pinggir pantai namun kondisi saat ini karung tersebut tidak berfungsi dengan baik karena karung sudah hancur oleh arus ombak yang sangat kuat.

Ketiga, abrasi membuat rumah warga banyak mengalami rusak, Kondisi abrasi terjadi dalam beberapa tahun terakhir sehingga menghabiskan sekitar 80 meter daratan pantai yang akhirnya berdampak pada rumah warga korong pasir baru dengan itu perlu pembuatan batu grip tetapi batu grip di Nagari Pilubang belum dilakukan secara menyeluruh oleh pemerintah.

Keempat, anggaran yang kurang dari pemerintah dalam mitigasi abrasi seperti belum dibangunnya batu grip secara menyeluruh yang membuat rumah warga di sekitar pantai terkena abrasi.

Kelima, Koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mitigasi risiko abrasi belum terlaksana secara optimal dapat disebabkan oleh sejumlah faktor. Salah satu kemungkinan adalah kurangnya komunikasi yang efektif antara kedua tingkatan pemerintahan tersebut. Hal ini dapat menghambat pertukaran informasi dan koordinasi tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko abrasi. Selain itu, terbatasnya sumber daya dan kebijakan yang tidak selaras antara pemerintah pusat dan daerah juga dapat menjadi hambatan. Ketidaksiuaian antara kebijakan nasional dan kebutuhan lokal dalam mitigasi risiko abrasi bisa menghambat implementasi tindakan yang efektif.

Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan mitigasi abrasi yaitu kendala internal berupa Keterbatasan anggaran menjadi hambatan signifikan dalam upaya mitigasi risiko abrasi di Nagari Pilubang Kabupaten Padang Pariaman. Dalam konteks ini, dana yang tersedia mungkin tidak mencukupi untuk membiayai proyek-proyek perlindungan pantai yang diperlukan, seperti pembangunan tanggul atau pemulihan ekosistem pantai. Kurangnya anggaran juga dapat membatasi kemampuan pemerintah daerah untuk melakukan pemantauan dan pemeliharaan yang rutin terhadap struktur

pertahanan pantai yang telah ada, meningkatkan risiko kerusakan lebih lanjut akibat abrasi dan Ketersediaan infrastruktur pembangunan untuk bencana abrasi di Nagari Pilubang mengacu pada fasilitas dan infrastruktur yang digunakan untuk mengurangi dampak abrasi atau orosi pantai. Ini mencakup tanggul, tembok penahan, atau vegetasi pantai oleh gelombang air laut. Hal tersebut berdasarkan wawancara peneliti dengan Masyarakat nagari Pilubang.

Selanjutnya kendala eksternal berupa Kesadaran masyarakat dalam mitigasi bencana abrasi, tingkat kepercayaan, dan tingkat keterlibatan masyarakat dalam melaksanakan mitigasi resiko abrasi. Partisipasi masyarakat adalah hal yang penting dalam tercapainya mitigasi abrasi. Berdasarkan hasil temuan peneliti, peran serta masyarakat dalam menghadapi bencana abrasi masih dikatakan sangat kurang. Partisipasi aktif masyarakat merupakan elemen penting dalam upaya mitigasi risiko abrasi di Nagari Pilubang Kabupaten Padang Pariaman. Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, implementasi, dan pemantauan proyek-proyek perlindungan pantai dapat meningkatkan keberlanjutan dan efektivitas langkah-langkah mitigasi yang diambil. Misalnya, melalui program-program partisipatif seperti gotong royong, masyarakat dapat secara langsung terlibat dalam kegiatan pemeliharaan infrastruktur pertahanan pantai, seperti membersihkan sampah atau memperbaiki tanggul yang rusak.

Peran pemerintah untuk meningkatkan mitigasi resiko abrasi di Nagari Pilubang Kabupaten Padang Pariaman yaitu telah dilakukan sosialisasi sekaligus dilakukan aksi bakti sosial yang berkordinasi dengan wali Nagari Pilubang, Korong Pasir Baru, Destana (desa tangguh bencana), BPBD Padang Pariaman, dan masyarakat. Aksi bakti sosial terkait abrasi yang mencakup berbagai kegiatan yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang terdampak langsung bencana abrasi pantai yang dilakukan seperti pembersihan pantai dimana pembersihan ini untuk mengorganisir kegiatan pembersihan pantai untuk menghilangkan sampah dan material lain yang dapat mempercepat proses abrasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Bogdan dan Taylor (dalam Murdiyanto, 2020)

menyatakan bahwa penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari informan, Pada penelitian ini, informan berfungsi untuk memperoleh informasi terkait peran Pemerintah dalam mitigasi resiko abrasi di Nagari Pilubang Kabupaten Padang Pariaman. Dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Teknik purposive sampling merupakan teknik penentuan sampel dengan mempertimbangkan sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu agar mendapatkan data dan informasi yang akurat serta perilaku yang diamati. Lokasi penelitian ini adalah di Korong Pasir Baru, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi proses pengumpulan data secara langsung di lapangan. Tujuan dilakukannya observasi yaitu untuk mendeskripsikan perilaku objek dan memahaminya atau bisa juga hanya ingin mengetahui frekuensi suatu kejadian. Berdasarkan pemahaman tersebut maka inti dari observasi adalah adanya perilaku yang tampak dan adanya tujuan yang ingin dicapai. Perilaku yang tampak dapat berupa perilaku yang dapat dilihat langsung oleh mata, dapat didengar, dapat dihitung, dan dapat diukur. Wawancara salah satu metode pengumpulan data yang menggunakan komunikasi langsung antara dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut, dan dokumentasi. Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang melibatkan penggunaan dokumen-dokumen, baik yang tertulis maupun yang berbentuk gambar, yang relevan dengan topik penelitian ini. Dokumen-dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan peran Pemerintah dalam mitigasi risiko abrasi di Nagari Pilubang Kabupaten Padang Pariaman. Sumber data dalam penelitian ini mencakup data primer dan data sekunder. Untuk menguji keabsahan data, peneliti menggunakan triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang didapatkan melalui beberapa sumber. Sebagaimana dikenal bahwa dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumen.. Tahapan analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui pelaksanaan peran pemerintah dalam mengatasi resiko abrasi di Nagari Pilubang Kabupaten Padang Pariaman, peneliti menggunakan tiga poin peran pemerintah berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Labolo (2010) yaitu sebagai berikut:

Peran Pemerintah sebagai Regulator

Regulator merupakan menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan. Sebagai regulator, peran pemerintah sebagai regulator memberikan acuan dasar kepada pemerintah sebagai instrumen untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan untuk mitigasi bencana abrasi.

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan peran pemerintah sebagai regulator belum terlaksana sebagaimana mestinya dimana sudah ada undang-undang 17 tahun 2019 dan undang-undang 32 tahun 2009 tetapi belum sepenuhnya diterapkan di masyarakat dimana tujuan undang-undang ini untuk memfasilitasi pembangunan dan kemajuan pemerintah dalam melakukan pencegahan abrasi pantai di Pasir Baru selain itu undang-undang ini juga mempertegas bahwa untuk pembangunan rumah masyarakat itu 100 meter dari bibir pantai, tetapi karena masyarakat sudah terlanjur membangun rumah disana. Ada 13 rumah sudah berada pada bibir pantai, 8 unit gudang penyimpanan ikan tidak lagi berada pada bibir pantai (sebagian sudah dibongkar karena telah dihantam gelombang) dan terancamnya \pm 100 unit rumah penduduk dan berpotensi adanya korban jiwa akibat bencana abrasi di Pasir Baru. rumah masyarakat yang sangat dekat dengan pantai ini sangat berbahaya bagi kehidupan masyarakat dan aktivitas sehari-hari masyarakat dimana pantai di Korong Pasir Baru sering terjadi abrasi yang banyak mengakibatkan rumah masyarakat terkena dampak abrasi padahal sudah ada dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tetapi masyarakat tidak mematuhi itu membuat banyak rumah warga yang rusak terhadap abrasi ada \pm 100 unit rumah penduduk yang yang terancam dan berpotensi adanya korban jiwa akibat bencana abrasi ini. Rumah yang sering terkena abrasi di dekat pantai menghadapi tantangan yang serius terkait dengan keberlangsungan properti mereka. Abrasi pantai, yang terjadi ketika air laut menggerus dan menghilangkan bagian dari pantai atau tebing, dapat menyebabkan

kerusakan struktural pada rumah dan lahan di sekitarnya. Dampaknya bisa sangat merugikan, mulai dari rusaknya fondasi bangunan hingga kehilangan lahan yang signifikan.

Peran Pemerintah sebagai Katalisator

Katalisator merupakan mendorong keterlibatan masyarakat dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam proses pembangunan daerah adalah penting untuk memastikan kemajuan berkelanjutan. Pemerintah dapat memainkan peran yang signifikan dengan memberikan arahan dan bimbingan yang intensif serta efektif kepada masyarakat melalui penyuluhan dan pelatihan yang di selenggarakan oleh tim khusus atau lembaga yang di tunjuk. Hasil penelitian di lapangan menunjukkan peran pemerintah sebagai katalisator belum terlaksana sebagai mestinya dimana pelaksanaan sosialisasinya dalam jangka waktu yang lama dan untuk sosialisasi dengan masyarakat tdk meyeluruh hanya dilakukan dengan perwakilan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari upaya yang dilakukan BPBD Padang Pariaman dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat itu ada dilakukan secara langsung. Selain itu juga tidak dilakukan sosialisasi ke sekolah.

SMP 4 Sungai Limau oleh BPBD Padang Pariaman padahal itu sangat penting dilakukan karena sekolah ini sangat dekat dengan pantai. Tujuannya adalah untuk mengenalkan secara dini kepada anak-anak mengenai pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana sehingga anak-anak mampu menyelamatkan diri saat jauh dari orang tua. Selain itu, juga dilakukan pelatihan dan sosialisasi kepada masyarakat melalui aksi bakti sosial yang kegiatannya membersihkan area pantai dari sampah-sampah yang dibuang sembarangan oleh masyarakat serta desa tanggu bencana melakukan pelatihan yang berkoordinasi dengan BPBD Padang Pariaman terkait bencana yang terjadi di Sungai Limau. Telah dilakukan sosialisali sekaligus dilakukan aksi bakti sosial yang berkordinasi dengan wali Nagari Pilubang, Korong Pasir Baru, Destana (desa tangguh bencana), BPBD Padang Pariaman, dan masyarakat. Aksi bakti sosial terkait abrasi yang mencakup berbagai kegiatan yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang terdampak langsung bencana abrasi pantai yang dilakukan seperti pembersihan pantai dimana pembersihan ini untuk mengorganisir kegiatan pembersihan pantai untuk menghilangkan

sampah dan material lain yang dapat mempercepat proses abrasi. Selain itu juga dilakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait mengajak semua pihak untuk aktif dalam program perlindungan pantai dan pengurangan resiko abrasi, selain itu agar dapat melindungi lingkungan pesisir dan kehidupan masyarakat yang rawan akan terjadinya abrasi di Korong Pasir Baru.

Telah dilakukan pelatihan oleh desa tangguh bencana yang berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman dan Wali Nagari Pilubang. Dalam pelatihan ini dibahas tentang program fasilitas penguatan ketangguhan masyarakat dimana Program fasilitas penguatan ketangguhan masyarakat adalah suatu upaya komprehensif yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan. Salah satu aspek utama dari program ini adalah memberikan pelatihan keterampilan kepada masyarakat. Melalui pelatihan ini, masyarakat dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas mereka, seperti keterampilan pertanian berkelanjutan, kewirausahaan, manajemen risiko, dan keterampilan hidup.

Selain itu, program ini juga bertujuan untuk memperkuat institusi lokal, seperti kelompok petani, kelompok wanita, dan lembaga adat. Dengan memperkuat institusi lokal, masyarakat dapat lebih efektif dalam mengelola sumber daya secara berkelanjutan dan membangun jaringan sosial yang kuat di tingkat komunitas. Selain itu, program ini juga mencakup aspek pendidikan dan informasi, dengan mengadakan program pendidikan dan kampanye informasi tentang mitigasi risiko bencana, adaptasi perubahan iklim, kesehatan, dan hak-hak dasar. Melalui upaya ini, diharapkan masyarakat dapat menjadi lebih tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan yang dihadapinya.

Peran Pemerintah sebagai Fasilitator

Fasilitator merupakan memberikan fasilitas atau sarana pendukung dalam berbagai aktivitas untuk mempermudah kegiatan pada proses tertentu. Fasilitator merujuk pada peran pemerintah yang dimainkan oleh seorang fasilitator dalam suatu situasi atau proses tertentu. Selain itu peran pemerintah sebagai fasilitator merupakan menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksana pembangunan

untuk menjembatani berbagai macam kepentingan masyarakat dan mengotimalkan pembangunan daerah.

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan peran pemerintah sebagai fasilitator belum terlaksana dengan semestinya. Hal ini bisa dilihat dari upaya yang diberikan oleh pemerintah dalam mitigasi bencana abrasi hanya memberikan bantuan karung kepada masyarakat itu pun pemberian karungnya tidak menentu yang membuat masyarakat resah karena terganggunya aktifitas masyarakat akibat abrasi yang terus menerus terjadi. Selain itu pemberian fasilitas hanya dalam bentuk karung untuk mencegah abrasi seringkali tidak memadai. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran, kurangnya koordinasi antara pemerintah dan masyarakat, atau kurangnya pemahaman tentang kebutuhan yang sebenarnya di lapangan. Selain itu penting bagi pemerintah untuk mempertimbangkan pendekatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan dalam pencegahan abrasi, seperti pengembangan infrastruktur pengamanan yang lebih kokoh dan strategi non-struktural seperti penyuluhan dan pengaturan tata ruang yang bijaksana. Selain itu, konsistensi dalam pemberian fasilitas juga penting agar masyarakat dapat merasa didukung secara berkelanjutan dalam menghadapi ancaman abrasi.

Dapat dilihat ada rambu-rambu jalur evakuasi jika terjadinya bencana dimana tujuannya dipasang yaitu tanda atau penanda yang dipasang untuk memberikan petunjuk kepada orang-orang tentang jalur yang harus diikuti saat evakuasi dalam situasi darurat atau bencana. Rambu jalur evakuasi biasanya mencakup arah evakuasi, jarak ke tempat evakuasi terdekat, dan instruksi penting lainnya seperti "Keluar" atau "Evakuasi". Mereka ditempatkan di lokasi yang mudah terlihat dan diakses oleh orang-orang di tempat umum, bangunan, atau area yang rentan terhadap bencana. Rambu ini penting untuk memastikan bahwa orang-orang dapat menemukan jalur evakuasi dengan cepat dan aman saat situasi darurat terjadi.

PENUTUP

Dapat diambil kesimpulan bahwa peran pemerintah dalam mitigasi resiko abrasi di Nagari Pilubang Kabupaten Padang pariaman dimana pelaksanaan Peran Pemerintah Dalam Mitigasi Resiko Abrasi Di Nagari Pilubang

Kabupaten Padang Pariaman belum terlaksana dengan maksimal, mengacu pada Teori Labolo (2010) dari 3 poin peran pemerintah namun memang belum mencapai target yang maksimal dalam mitigasi abrasi di Nagari Pilubang Kabupaten Padang Pariaman. Pada peran pemerintah sebagai regulator terlihat bahwa sudah ada undang-undang 17 tahun 2019 dan undang-undang 32 tahun 2009 tetapi belum sepenuhnya diterapkan di masyarakat dimana tujuan undang-undang ini untuk memfasilitasi pembangunan dan kemajuan pemerintah dalam melakukan pencegahan abrasi pantai di Pasir Baru selain itu undang-undang ini juga mempertegas bahwa untuk pembangunan rumah masyarakat itu 100 meter dari bibir pantai tetapi karena masyarakat sudah terlanjur membangun rumah disana. peran pemerintah sebagai katalisator yang dimana pelaksanaan sosialisasinya dalam jangka waktu yang lama dan untuk sosialisasi dengan masyarakat tdk meyeluruh hanya dilakukan dengan perwakilan masyarakat. peran pemerintah sebagai fasilitator yang diberikan oleh pemerintah dalam mitigasi bencana abrasi hanya memberikan bantuan karung kepada masyarakat itu pun pemberian karungnya tidak menentu yang membuat masyarakat resah karena terganggunya aktifitas masyarakat akibat abrasi yang terus menerus terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, C. K., Walpa, J. A., & Octavia, V. (2020). Pertanggungjawaban Pemerintah Republik Indonesia Terhadap Hilangnya Hak Atas Tanah Milik Warga Masyarakat Yang Terkena Abrasi di Wilayah Kabupaten Brebes Jawa Tengah. *Cepalo*, 4(2), 129-142.
- Amora, R. R. (2021). *Peranan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau Dalam Mengatasi Abrasi Di Kabupaten Kepulauan Meranti* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Dermawan, I. (2020). *Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Barat Daya dalam Menanggulangi Abrasi Air Laut di Gampong Kedai Palak Kerambil Kecamatan Susoh* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).
- Desty Stephany Solahudin , Novie Indrawati Sagita , Jajang Sutisna (2022) optimalisasi peran litbang dalam mewujudkan kegiatan litbang satu pintu di kota bandung.
- Julis, M. (2016). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Tanggap Bahaya Abrasi di Kelurahan Air Manis Kecamatan Padang Selatan Kota Padang. *Jurnal Kepemimpinan Dan Pengurusan Sekolah*, 1(2).
- Maulana, E., Wulan, T. R., Wahyuningsih, D. S., Mahendra, I. W. W. Y., & Siswanti, E. (2016). Strategi pengurangan risiko abrasi di pesisir Kabupaten Rejang, Jawa Tengah.
- Murdiyanto, Eko.2020. Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai Contoh Proposal) lembaga penelitian dan pengandian pada masyarakat UPN Veteran”Yogyakarta Press: Yogyakarta
- Ramadhan, D. (2019). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Mitigasi Bencana Abrasi Pantai di Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, Indonesia
- Ratna dila, r. (2023). Kinerja bpbd dalam menangani bencana daerah berdasarkan perda nomor 11 tahun 2015 di kecamatan rangsang kabupaten kepulauan meranti menurut perspektif fiqh siyasah (doctoral dissertation, universitas islam negeri sultan syarif kasim riau).
- Sugiyono.2022. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta
- Setyati, W. A., Rezagama, A., Agustini, T. W., Hidayat, Y., Wishnu, N. P., & Wulandary, D. A. (2018). Inovasi penanganan mitigasi bencana Desa Bedono Kecamatan Sayung Demak akibat efek abrasi. *SNKPPM*,
- Sopacua, Y., & Salakay, S. (2020). Sosialisasi Mitigasi Bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon. *Communicare: Journal of Communication Studies*, 7(1), 1-17.
- Suryandari, N. (2022). Mewaspadai Bencana: Perspektif Global tentang Komunikasi

Risiko Bencana. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 8(2), 162-169.

Vickli Dorongsihae, Sarah Sambiran, Fanley pangemanan (2022) peran pemerintah desa dalam pengembangan kearifan lokal di desa Pontak Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan.

Wulandari, A., Shohibuddin, M., & Satria, A. Strategi Adaptasi Rumah Tangga Nelayan Dalam Menghadapi Dampak Abrasi: Studi Kasus Di Kabupaten Pasaman Barat Adaptation Strategies by Fishing Household toward the Impact of Coastal Erosion: A Case Study in West Pasaman Regency.

Wulandari, T., Tanjung, Y. I., Festiyed, F., Asrizal, A., Desnita, D., & Diliarosta, S. (2023). Literature Review: Analisis Integrasi Mitigasi Bencana pada Pembelajaran. *SAP (Susunan Artikel Pendidikan)*, 7(3), 390-396.